

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut maka Pemerintah secara insentif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.16 Tahun 2009).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Perpajakan di Indonesia sendiri menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari 4 (empat) jenis pajak. Sedangkan pajak daerah terdiri dari 16 (enam belas) jenis pajak yang dibagi menjadi 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) pajak kabupaten / kota.

Salah satu jenis pajak propinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Menurut Jaya Isman (Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat) sektor penerimaan pajak kendaran bermotor pada pertengahan bulan Maret 2013 mencapai 20.68% atau sekitar 127.000.000.000 dari target sekitar 617.000.000.000 jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 580.000.000.000 tingkat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari pada tahun 2012. Kutipan tersebut diambil dari blog <https://sumbar.antaraneews.com> yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2013 pukul 09.49 WIB. Maka dari itu mengingat semakin meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ketahun yang tidak lepas dari meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, maka untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor tersebut perlu melakukan peningkatan pelayanan dan berbagai inovasi serta terobosan-terobosan baru. Salah satu inovasi tersebut adalah mengatifkan pengoperasian layanan Samsat Keliling.

SAMSAT Keliling adalah salah satu program unggulan Kantor SAMSAT Provinsi Sumatera Barat yang melayani pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dimana program pelayanannya secara bergerak atau disebut dengan Mobile (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011).

Tujuan dari pelayanan SAMSAT Keliling ini adalah untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada wajib pajak terutama yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, sehingga tidak dapat datang mengurus ke kantor bersama SAMSAT maka dengan adanya SAMSAT Keliling wajib pajak akan sangat terbantu mempersingkat waktu dalam pengurusan pengesahan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun dengan diterapkannya inovasi SAMSAT Keliling realisasi penerimaan objek PKB pada tahun 2014 hingga 2017 tidak selalu mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan dapat dibuktikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Objek PKB

No	Tahun	Objek Pajak
1	2014	28562
2	2015	19839
3	2016	14947
4	2017	18639

Sumber : SAMSAT Kota Padang

SAMSAT Keliling Kota Padang mulai beroperasi setiap hari Senin hingga hari Sabtu. Yang mana pada hari Senin hingga hari Kamis SAMSAT Keliling

mulai beroperasi pada pukul 08.30 WIB sampai pukul 15.00 WIB dan pada hari Jumat dan Sabtu mulai dari pukul 08.30 WIB hingga 11.30 WIB.

Dengan adanya pengoperasian SAMSAT Keliling yang akan mempengaruhi penerimaan PKB yang diterima, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh kedalam bentuk penelitian yang berjudul :**“Kontribusi SAMSAT Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

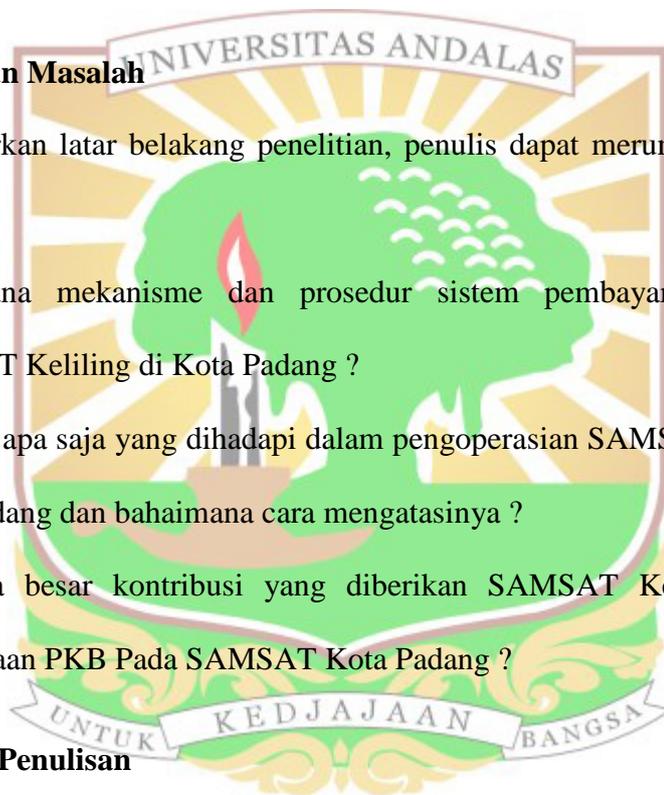
Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur sistem pembayaran PKB pada SAMSAT Keliling di Kota Padang ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengoperasian SAMSAT Keliling di Kota Padang dan bagaimana cara mengatasinya ?
3. Seberapa besar kontribusi yang diberikan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan PKB Pada SAMSAT Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan prosedur sistem pembayaran PKB pada SAMSAT Keliling di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pengoperasian SAMSAT Keliling dan cara mengatasinya.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan SAMSAT Keliling terhadap penerimaan PKB pada SAMSAT Kota Padang.



1.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan selama 40 hari kerja yang beralokasi pada Kantor SAMSAT Kota Padang yang beralokasi di Jl. Asahan No.2 Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Indonesia, dengan nomor telpon: (0751) 7051536.

Dalam tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini Penulis mempersiapkan konsep-konsep teori yang telah diterima dalam perkuliahan, penentuan objek lokasi, mencari bahan untuk pembuatan proposal serta melakukan konsultasi dengan pihak dosen.

2. Studi Literatur

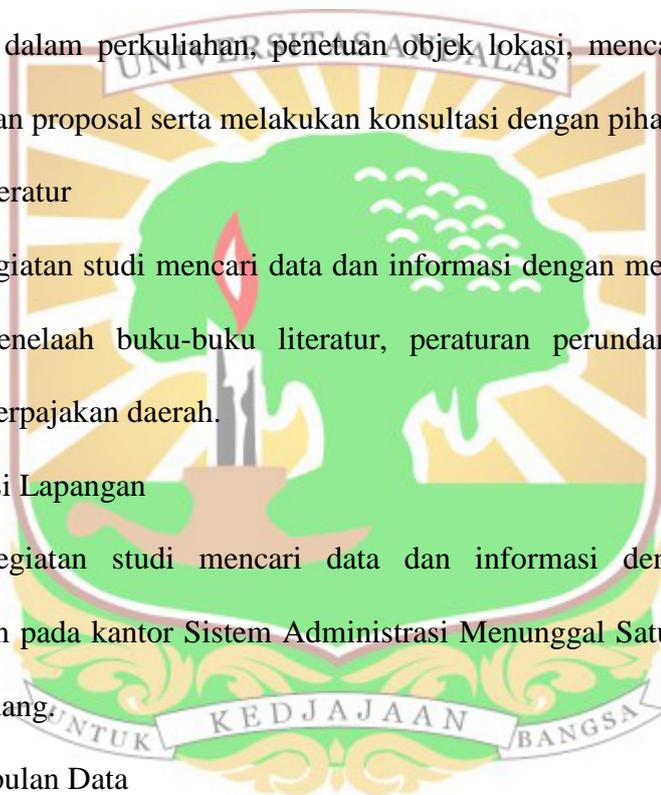
Yaitu kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori, menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

3. Observasi Lapangan

Yaitu kegiatan studi mencari data dan informasi dengan mengikuti penelitian pada kantor Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (Samsat) Kota Padang.

4. Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mulai mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti data primer yang diperoleh dari pihak-pihak yang memahami dan menguasai objek kajian dalam penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari referensi ilmiah yang mendukung laporan penyajian penelitian.



5. Analisis dan Evaluasi data

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi/jalan keluar yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk menyimpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian lapangan, maka penulis, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Daftar Observasi

Pengamat melakukan pengamatan langsung dalam mengamati dan mengumpulkan data dari responden dengan melakukan wawancara dengan petugas SAMSAT Keliling serta wawancara dengan wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Daftar Dokumentasi

Dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi mengenai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau prinsip-prinsip yang dianggap sah sebagai bukti otentik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini dibagi lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan secara teori mengenai defenisi pajak, fungsi dan jenis pajak, sistem pemungutan pajak, defenisi dan Objek

serta Subjek pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, dan tarif pajak kendaraan bermotor.

BAB III Gambaran Umum

Bab ini berisikan tentang gambaran umum SAMSAT Kota Padang, sejarah umum SAMSAT Kota Padang, serta gambaran operasi dan struktual organisasi SAMSAT Kota Padang.

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisikan pengkajian hasil pembahasan lebih lanjut dan permasalahan yang ditemukan.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai kontribusi SAMSAT Keliling terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

